

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

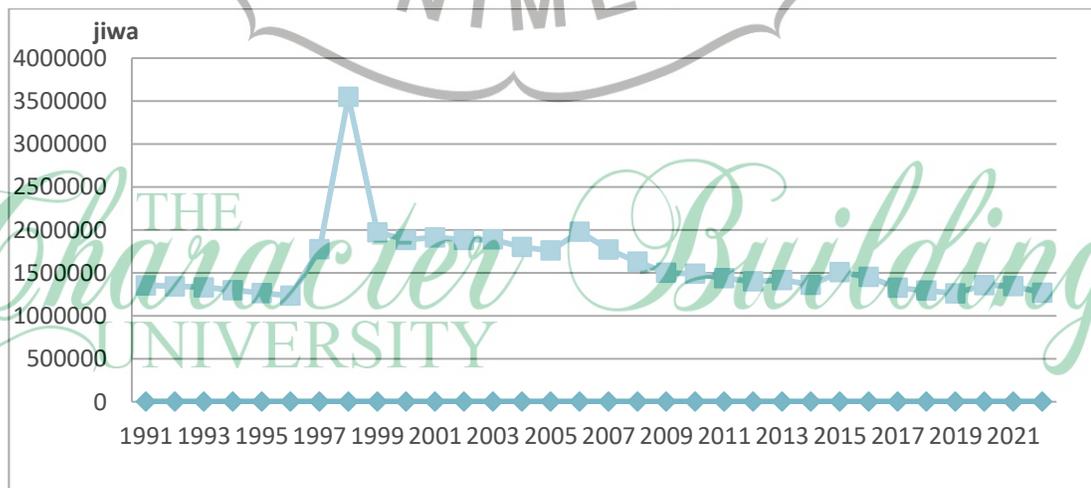
Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks pada negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kemiskinan sebagai keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat berlindung, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup besar bagi pemerintah. Kemiskinan terus menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini pemerintah Indonesia masih belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan tinggi rendahnya konsumsi dan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan tinggi rendahnya pendidikan, kesehatan dan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk ikut didalam proses pembangunan

Provinsi Sumatera Utara sebagai integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga melaksanakan pembangunan daerah seperti provinsi- provinsi lainnya di Indonesia. Konteks pembangunan Sumatera Utara tentunya menentukan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam menyediakan modal untuk keperluan mempercepat proses pembangunan membuka diri pada arus modal pihak swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing untuk berinvestasi di daerah Sumatera Utara.

Menurut Tambunan (2003), masalah besar dalam pembangunan yang di hadapi banyak Negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Gambar 1.1

Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan Gambar dapat dilihat bahwa tingkat penduduk miskin pada Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1991-2022 terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan.

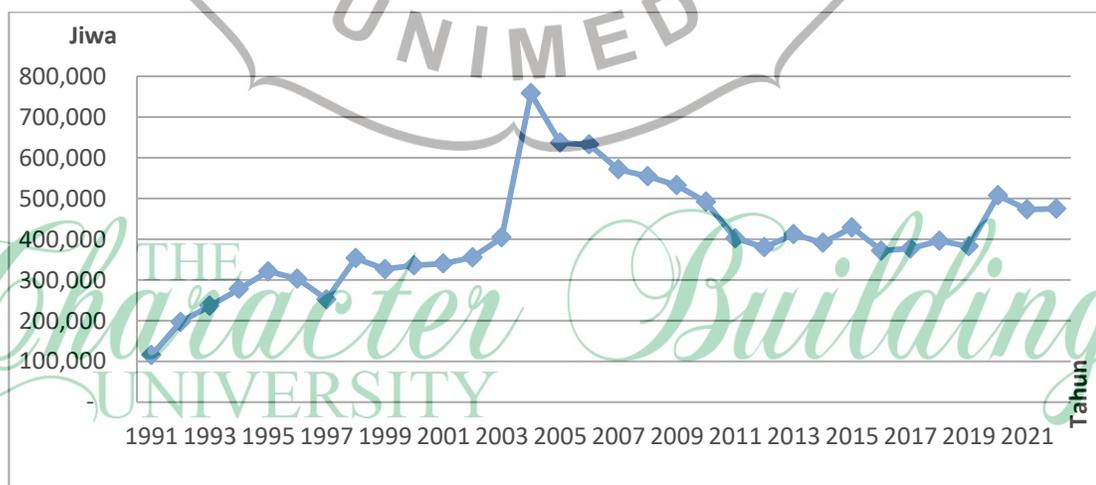
Terdapat empat fase penurunan dan kenaikan yang terjadi, fase pertama dari tahun 1997 sebanyak 1,775,321 juta jiwa cenderung meningkat tajam sampai pada tahun 1998 sebanyak 3,550,642 juta jiwa, kenaikan tingkat kemiskinan tersebut dipicu oleh krisis moneter, kemudian dari Tahun 2006 sebanyak 1,979,702 juta jiwa dan kemudian meningkat pada Tahun 2015 menjadi 1,508,140 juta jiwa, kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dipicu oleh harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Fase kedua terjadi penurunan pada Tahun 2016 sebanyak 1,452,550 hingga Tahun 2019 sebanyak 1,260,500 juta jiwa, lalu mulai meningkat pada tahun 2020 sebanyak 1,356,720 juta jiwa. Meningkatnya angka kemiskinan di Sumatera Utara akibat terjadinya pandemi Covid-19, hal ini didukung oleh penelitian (Setyadi dan Indriyani, 2021) bahwa pandemi membawa dampak yang luar biasa mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat, Kemudian pada Tahun 2021 menurun sebanyak 1,343,860 sampai pada tahun 2022 sebanyak 1,268,190, dalam penurunan tersebut Biro Perekonomian Sumatera Utara telah memperbaiki situasi tersebut melalui program bantuan sosial, bantuan petani dan nelayan, infrastruktur, kredit usaha rakyat (KUR), serta implementasi dana pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan penurunan tersebut, angka kemiskinan di Sumatera Utara berkurang sekitar 75,6 ribu jiwa, hal ini didukung melalui data Biro Perekonomian Sumatera Utara (2021).

Menurut (Basir Barthos, (2012:15) “ Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya penduduk pada umumnya”. Maka dengan demikian salah satu akar permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan pekerja yaitu ketenagakerjaan.

Pengangguran merupakan masalah setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki masalah pengangguran. Berikut grafik pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.2
Pengangguran di Sumatera Utara tahun 1991-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1991-2022 mengalami fluktuasi. Pengangguran terendah pada

tahun 1991 di Provinsi Sumatera Utara terendah yaitu sebesar 115,316 jiwa sedangkan pada tahun 2004 terjadi peningkatan tajam sebesar 758,092 jiwa, hal ini didukung oleh (Purnama,2015) pada tahun tersebut terjadi akibat dikarenakan rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada.

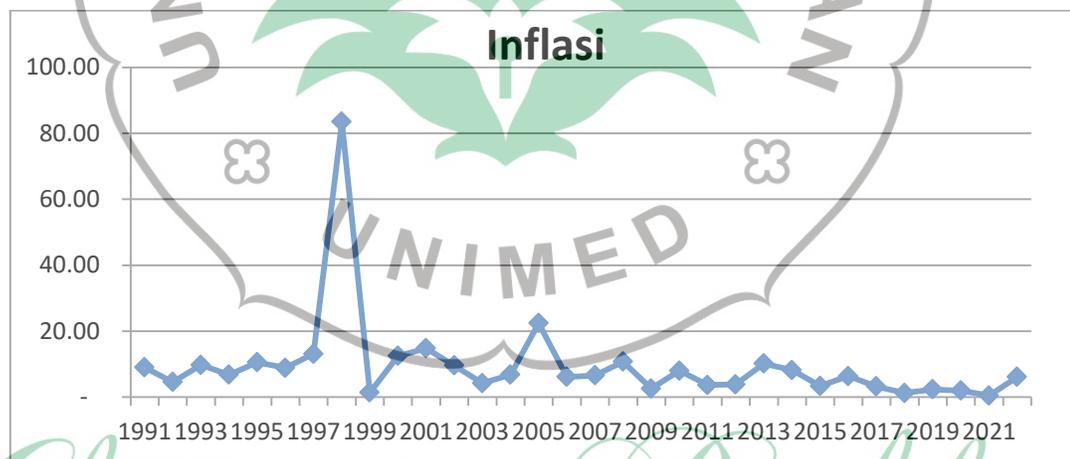
Pada Tahun 2006 sampai 2012 jumlah penurunan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 632,049 jiwa pada tahun 2006 menjadi 379,980 pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dapat terserap pada lapangan yang tersedia. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan 43,40 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di Sektor Pertanian 7,68 di sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi sebesar 19,42 persen. Sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan menyerap sebanyak 15,56 persen dan di pengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Selanjutnya tingkat pengangguran mengalami kenaikan turun yang dimulai dari tahun 2013 sebanyak 413,200 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 428,794 yang mengalami kenaikan, hingga menurun kembali menjadi 382,438 jiwa pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 507,805 hingga pada tahun 2022 menurun sebanyak 473,000. Keadaan ini menunjukkan tingkat pengangguran di Sumatera Utara masih tinggi. Pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2020 memang tergolong tinggi akibat pandemi Covid-19 yang tidak hanya akan

menciptakan kemiskinan tetapi akan berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk pengangguran.

Menurut Sukirno (2010:338) bahwa “Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan sahaja menimbulkan beberapa efek buruk kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat”. Berikut data 32 tahun terakhir inflasi Sumatera Utara.

Gambar 1.3
Inflasi di Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1991 sampai pada tahun 2022 mengalami fluktuasi (naik-turun). Inflasi di Provinsi Sumatera Utara masih tergolong ringan karena masih rendah dibawah 10 persen, bahkan 2018 mencapai 1,23 persen, angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam 32 tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 1998 terjadi peningkatan tajam melebihi 10 persen yaitu sebesar 83,56 persen dimana disebabkan karena

dampak dari krisis moneter yang terjadi dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar serta faktor sosial politik yang tidak aman mengakibatkan harga barang dan jasa terus meningkat tajam pada tahun tersebut. Pada tahun 2001 inflasi di Sumatera Utara terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 14,79% disebabkan masih terasanya pengaruh krisis moneter. Tahun 2002-2004 inflasi mulai mengalami penurunan. Tahun 2005 kembali mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu 22,41% ini merupakan inflasi tertinggi setelah krisis moneter, kenaikan inflasi ini terjadi karena adanya kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Tingginya harga minyak mentah internasional membuat pemerintah berupaya untuk menghapus subsidi BBM akibatnya harga barang-barang dan jasa mengalami kenaikan yang cukup besar.

Kemudian tahun 2006 dan 2007 mengalami penyesuaian, dan angka inflasi kembali mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2008 inflasi kembali naik yaitu 10,72% dipengaruhi oleh krisis keuangan global dan harga bahan makanan yang bergejolak. Laju inflasi tahun 2009-2012 menunjukkan kondisi yang stabil dengan rata-rata inflasi sebesar 4,53%. Namun pada tahun 2013 inflasi naik kembali menjadi 10,18% disebabkan karena terjadinya kenaikan harga bahan makanan. Selanjutnya tahun 2014-2022 laju inflasi menunjukkan pada kondisi yang stabil dengan rata-rata inflasi sebesar 3,82%.

Dengan kata lain menurut Harrod dalam Jlingan (2000,34) melalui teori pembangunan ekonominya menyebutkan semakin besar investasi suatu daerah maka semakin besar pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, pertumbuhan ekonomi

yang tinggi akan mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri. Berikut ini grafik investasi Provinsi Sumatera Utara tahun 1991-2022.

Gambar 1.4
Investasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1991-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dijelaskan bahwa Investasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1991 sampai pada tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 investasi tertinggi sebesar 31,981,10 milyar dan investasi terendah pada tahun 1991 sebesar 273.80 milyar sementara pada tahun 2018, investasi sebesar 25, 860,19 milyar. Menurut Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian (2018) penurunan investasi PMDN pada tahun 2018 di Sumatera Utara akibat dari melambatnya nilai investasi industri kertas dan percetakan, industri tekstil serta industri non logam. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung beralih menggunakan teknologi digital, turunya harga kertas global yang di iringi dengan melemahnya pertumbuhan industri kertas domestik juga menjadi penyebab turunya minat investor subsektor. Begitu juga

pada tahun 2020 investasi juga menurun sebesar 18,484,50milyar, penyebab utama menurunnya perkembangan nilai investasi di Sumatera Utara adalah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia bahkan dunia yang berdampak pada seluruh aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah kemiskinan dengan segala faktor yang mempengaruhinya untuk dikaji lebih lanjut dan mendalami tentang “ **Analisis Pengaruh Pengangguran, Inflasi, Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang diterima pemerintah belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang belum bisa terpecahkan di setiap negara dikarenakan ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia.
3. Tingkat inflasi di Sumatera Utara mengalami naik turun (fluktuasi) dan inflasi tertinggi terdapat pada tahun 1998 sebesar 83,56 % dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis moneter dan politik tidak aman.

4. Pada tahun 2017 sampai 2022 investasi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan latar belakang dan identifikasi masalah serta keterbatasan yang ada, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini terbatas pada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara.

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen Pengangguran, Inflasi dan Investasi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel dependen penelitian ini yaitu kemiskinan di Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pengangguran, Inflasi, investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dimana Pengangguran, Inflasi dan investasi sebagai variabel bebas (independen) dan yang terdiri dari 32 tahun di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1991-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah dan batasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh Pengangguran, Inflasi, Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, Inflasi, Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan kegunaan bagi semua orang terutama bagi penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- Guna mengembangkan wawasan penulis tentang Analisis Pengaruh Pengangguran, Inflasi, Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara serta sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Pemerintah

- Diharapkan hasil penelitian ini menjadi gambaran ataupun referensi bagi instansi pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan tentang kemiskinan di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara.

3. Kampus UNIMED

- Hasil penelitian ini diinginkan bermanfaat sebagai bahan ajaran dan nilai tambah di kalangan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan secara khusus bagi Program Studi Ilmu Ekonomi dalam menganalisis pengaruh Pengangguran, Inflasi, Investasi terhadap tingkat Kemiskinan.

- Sebagai referensi civitas akademik Universitas Negeri Medan ataupun pihak-pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap masalah yang sama pada yang akan datang.

THE
Character Building
UNIVERSITY